

Dampak Program Pembiayaan Mikro terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM

(Studi Kasus pada Koperasi Wanita Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar)

Dita Ayu Primantari^{1*}, Wydha Mustika Maharani², Abdul Aziz Al Kaharudin³

¹⁻³Universitas Islam Balitar, Indonesia

**Penulis Korespondensi:* 2ditaayuprimantari@gmail.com

Abstract. The main issue faced by MSME actors is limited capital, which hinders business development and their well-being. This study aims to evaluate the impact of the micro-financing program on improving the well-being of MSME actors, with a case study at the "Maju Makmur" Women's Cooperative in Minggirsari Village. Using a qualitative approach, the study found that the provision of capital to MSME actors in the cooperative has been well-implemented and has had a positive impact, particularly in increasing income, economic activities, and the ability to meet daily needs. Supporting factors for the success of this program include government funding support, good cooperative management, clear implementation and technical guidelines, and community support. On the other hand, hindering factors include the presence of other financial institutions in the village, causing cooperative members to have savings in other places, as well as bad loans and a lack of socialization regarding the micro-financing program. Overall, the micro-financing program at the "Maju Makmur" Women's Cooperative has significantly benefited the improvement of MSME actors' well-being in Minggirsari Village.

Keywords: Bad Loans; Government Support; Micro-Financing; MSME Well-Being; Women's Cooperative.

Abstrak. Masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal yang menghambat perkembangan usaha dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program pembiayaan mikro terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM, dengan studi kasus pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" di Desa Minggirsari. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM di koperasi tersebut telah berjalan baik dan memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan pendapatan, aktivitas ekonomi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain adalah adanya dukungan dana dari pemerintah, manajemen koperasi yang baik, petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas, serta adanya dukungan dari masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan adalah keberadaan lembaga keuangan lain di desa tersebut, yang menyebabkan anggota koperasi memiliki simpanan di tempat lain, serta adanya kredit macet dan kurangnya sosialisasi terkait program pembiayaan mikro. Secara keseluruhan, program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita "Maju Makmur" telah memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Desa Minggirsari.

Kata Kunci: Dukungan Pemerintah; Kesejahteraan UMKM; Koperasi Wanita; Kredit Macet; Pembiayaan Mikro.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara besar yang sedang berkembang, sehingga muncul banyak permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat sulit untuk tercapai (Kembaren, 2021). Salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberdayakan UMKM adalah memberikan kemudahan dan dukungan untuk mengembangkan usaha ekonomi berskala mikro/informal yang produktif, khususnya dari keluarga dengan berpenghasilan rendah atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Pada wilayah Kabupaten Blitar, jumlah UMKM terus meningkat, yakni tahun 2022, jumlah UMKM di Kabupaten Blitar lebih dari 31.000 dan pada akhir tahun 2023, jumlah UMKM telah meningkat menjadi 34.675. Mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah ini bergerak di bidang produksi kerajinan, makanan, dan minuman. (Jatimtimes, 2024). Dengan terus meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Blitar dapat menyumbang angka pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar.

Pembiayaan mikro dapat berasal dari bank maupun Lembaga Keuangan Mikro. Contoh Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi Wanita "Maju Makmur" di Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar. Mayoritas UMKM di Desa Minggirsari adalah bergerak di bidang sektor makanan dan minuman. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan modal usaha. Modal usaha merupakan modal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis atau kegiatan usaha. Keterbatasan modal usaha tersebut mengakibatkan suatu usaha menjadi sulit untuk berkembang dan sulit untuk memenuhi kebutuh sehari - sehari, sehingga kesejahteraan sulit untuk tercapai.

Dengan hadirnya pembiayaan mikro tersebut diharapkan dapat menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pelaku usaha, sehingga pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah dan kesejahteraan meningkat, seperti meningkatnya pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas hidup penerima pembiayaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembiayaan di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak program pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

2. TINJAUAN TEORITIS

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuannya. William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa evaluasi memiliki arti yang berhubungan dengan penilaian terhadap hasil kebijakan dan program berdasarkan sejumlah skala nilai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn, terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan program, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan (Hasbullah & Anam, 2019; Yanuar et al., 2023).

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dari suatu program tercapai. Program dianggap efektif jika ia berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi, di sisi lain, berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Program yang efisien dapat mencapai tujuan dengan menggunakan biaya yang lebih rendah atau sumber daya yang minimal. Kecukupan berhubungan dengan apakah program tersebut mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Perataan mengukur sejauh mana program dapat mengurangi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Responsifitas berfokus pada kemampuan program untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan situasi yang berkembang. Terakhir, ketepatan mengukur apakah program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dalam hal waktu, metode, dan lokasi.

Selain kriteria evaluasi kebijakan yang telah disebutkan, faktor pendukung dan faktor penghambat juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Menurut Mujab (2005) yang dikutip dalam Kamila, R.H., dkk. (2023), beberapa faktor pendukung evaluasi program meliputi adanya dukungan dana dari pemerintah, dukungan manajemen yang baik, keberadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, serta dukungan dari masyarakat. Dana yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, sementara dukungan manajerial dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Namun, dalam pelaksanaan program, terdapat faktor penghambat yang sering kali menjadi kendala. Di antaranya adalah pemahaman program yang kurang baik di kalangan pelaksana dan masyarakat. Ketika pemahaman terhadap tujuan dan proses program tidak jelas, pelaksanaan program cenderung tidak efektif. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara mendalam tentang program menjadi hambatan yang signifikan. Untuk program yang kompleks, diperlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman yang baik tentang program agar dapat dijalankan dengan baik. Faktor penghambat lainnya adalah ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dan pelaksanaan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan realita di lapangan sering kali menyebabkan kesulitan dalam implementasi program.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada faktor penghambat yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman program, kurangnya SDM yang memahami program, serta ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kondisi lapangan. Faktor-faktor ini sering menjadi hambatan utama dalam evaluasi program dan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan hasil yang dicapai.

Dampak Ekonomi

Menurut Cohen (Dwi, 2015: 21), dampak suatu kebijakan atau program terhadap perekonomian dapat diukur melalui beberapa indikator penting. Pertama, dampak terhadap pendapatan mengacu pada perubahan yang terjadi dalam pendapatan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu program. Program yang berhasil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik melalui peningkatan upah, laba usaha, maupun pendapatan dari sumber lainnya. Dampak ini menunjukkan sejauh mana program dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan atau kurang beruntung secara ekonomi. Kedua, dampak terhadap aktivitas ekonomi mengukur sejauh mana suatu kebijakan atau program mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat terjadi dalam bentuk peningkatan jumlah transaksi, berkembangnya usaha, atau meningkatnya produktivitas di sektor yang terdampak program. Ketiga, dampak terhadap pengeluaran merujuk pada perubahan dalam pola pengeluaran rumah tangga atau masyarakat setelah mengikuti suatu program. Pengeluaran ini bisa berkaitan dengan konsumsi, tabungan, atau investasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok setelah merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Ketiga indikator ini saling terkait, karena peningkatan pendapatan dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Evaluasi terhadap ketiga dampak ini sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang di kelola oleh pengusaha mikro, yakni masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Berdasarkan kegunaannya pembiayaan mikro atau sumber permodalan UMKM dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (Aldilla, R., 2021).

Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah sumber permodalan atau pembiayaan yang digunakan untuk menambah atau meningkatkan produksi.

Pembiayaan Investasi

Biasanya fasilitas ini dipergunakan untuk pembiayaan investasi, dimana nasabah ingin mengembangkan usahanya yang berkaitan dengan fasilitas atau barang - barang modal yang erat kaitannya. Jenis pembiayaan kedua ini biasanya dipergunakan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan selama beberapa tahun.

Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencakup beberapa hal, yaitu: a) peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha, b) peningkatan akses masyarakat terhadap pengembangan SDM, dan c) peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal (Kamarudin, 2013 dalam Menghayati, O.S & M. Iqbal, 2022).

Kesejahteraan

Menurut Syahza (2009:88) dalam Butar, N.B.B (2020), suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara relatif sempurna. Artinya, setiap keluarga harus mampu menyediakan kebutuhan hidupnya sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan dalam lingkup keluarga tersebut. Kesejahteraan ini tidak hanya tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada kualitas hidup yang lebih baik yang dapat dicapai dengan upaya dan pencapaian tertentu. Dalam konteks masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kesejahteraan dapat diukur dari keberhasilan dalam mengelola usaha mereka. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan modal, bertambahnya jumlah pelanggan, peningkatan jumlah produksi, perbaikan sarana fisik yang digunakan dalam menjalankan usaha, serta adanya perluasan usaha.

Menurut Kotler & Keller (2021), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan usaha, antara lain: pertama, pendapatan meningkat. Peningkatan pendapatan merupakan salah satu tanda utama bahwa usaha yang dijalankan berhasil, karena ini menunjukkan adanya penambahan nilai jual atau keuntungan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Kedua, pelanggan meningkat, yang mengindikasikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan semakin diterima oleh pasar dan berhasil menarik minat konsumen. Ketiga, karyawan bertambah. Bertambahnya jumlah karyawan menandakan bahwa usaha tersebut berkembang dan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mendukung operasionalnya.

Keempat, keuntungan meningkat, yang menunjukkan bahwa usaha tidak hanya berhasil dalam menghasilkan pendapatan, tetapi juga dalam mengelola biaya dan meraih laba yang optimal. Terakhir, aset bertambah, yang menunjukkan adanya ekspansi usaha, seperti penambahan fasilitas, mesin, atau aset lainnya yang menunjang jalannya usaha. Indikator - indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai seberapa jauh keberhasilan sebuah usaha dalam mencapai tujuan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan pemilik maupun masyarakat sekitar.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan kualitatif adalah untuk menggali data secara lebih mendalam terkait dengan fenomena tersebut, yang tidak bisa diukur dengan angka, sehingga dapat menguraikan bagaimana efektivitas program pembiayaan bagi pelaku usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar. Penelitian kualitatif bisa mendeskripsikan suatu fenomena dalam bentuk tulisan yang bersifat narasi, maka data dan fakta yang dikumpulkan akan berupa kalimat atau gambar daripada angka. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Moleong (2014:11) dalam Putri, C.N.O (2021:7) bahwa pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian di mana data - data yang dikumpulkan berupa kata - kata, gambar dan bukan angka. Data - data tersebut didapat dari hasil wawancara, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, memo, foto, video, dan dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014:31-33) terbagi menjadi tiga, yaitu *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Informan dalam penelitian ini adalah ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari, Bendahara Koperasi Wanita, dan empat nasabah Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Program Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM

Untuk mengukur sejauh mana kebijakan atau program pembiayaan mikro berdampak pada kesejahteraan pelaku UMKM di Desa Minggirsari dapat menggunakan kriteria - kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yakni sebagai berikut.

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu bentuk kriteria yang di dalamnya terdapat pencapaian suatu hasil yang dicapai. Dalam hal ini efektivitas berarti pencapaian target dari program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari, apakah target dari tujuan tersebut telah tercapai dengan baik atau belum.

Dalam suatu program ataupun kebijakan pasti mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan dalam hal ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau dicapai dalam program pembiayaan mikro. Setiap perubahan pasti menginginkan ke arah yang lebih baik, begitu pula efektivitas program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari harapannya adalah perubahan ekonomi yang lebih baik dari nasabah atau anggota koperasi tersebut.

Dilansir dari keterangan narasumber, yaitu pelaku usaha penerima pembiayaan pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari yang menunjukkan bahwa pendapatan yang di terima setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menjadi meningkat, sehingga usahanya dapat berkembang. Selain itu, pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari yaitu terdapat rapat atau pertemuan antar pengurus setiap satu bulan sekali di rumah Ketua Koperasi Wanita Desa Minggirsari. Pada pertemuan tersebut apabila terdapat kendala maka dapat diselesaikan secara bersama-sama.



Gambar 1. Pertemuan Rutin Pengurus dan Anggota Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

Sumber : Data Sekunder, 2025

Dari uraian di atas mengenai kriteria efektivitas (William N. Dunn, 2003) program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari, secara umum telah berjalan dengan baik dan hasil yang diinginkan telah tercapai, yaitu telah meningkatnya pendapatan bagi penerima pembiayaan selaku pelaku usaha dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, akan tetapi tetap dapat ditangani dengan baik oleh Koperasi Wanita Desa Minggirsari.

Efisiensi

Efisiensi menurut William N. Dunn (2003) adalah seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dalam penelitian tentang "Dampak Program Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus di Koperasi Wanita Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar)" berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Koperasi Wanita tersebut sebagai pemberi pinjaman modal untuk usaha.

Dalam aspek efisiensi pada program pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM adalah prosedur pinjaman modal di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari seperti yang dikatakan oleh Bendahara Koperasi Wanita Desa Minggirsari adalah menjadi anggota terlebih dahulu dan di survei, apakah calon anggota tersebut layak atau tidaknya untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi tersebut. Pinjaman pertama untuk anggota yang baru bergabung sebesar Rp. 500.000., Apabila anggota baru tersebut rapornya bagus, maka diperbolehkan untuk pinjam lebih dari itu dengan maksimal pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000., Syarat yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut adalah dengan KTP dan surat izin pinjam dari keluarga.

Sebagaimana data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan pelaku usaha penerima pembiayaan pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari terhadap penerima pembiayaan adalah ramah, cepat, dan mudah, karena tanpa jaminan. Selain itu, bunga yang diberikan kepada penerima pembiayaan di Koperasi Wanita Desa Minggirsari termasuk bunga yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan kriteria efisiensi oleh William N. Dunn (2003) yaitu memiliki ongkos moneter yang minimum dan prosesnya yang mudah.

Kecukupan

Kecukupan menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan dalam penelitian ini adalah sejauhmana program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari dalam pencapaian target dapat memecahkan permasalahan di Desa Minggirsari.

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Wanita Desa Minggirsari mampu untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal, terutama bagi kaum perempuan di Desa Minggirsari. Dilansir dari keterangan narasumber, yaitu pelaku usaha penerima pembiayaan pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menyampaikan bahwa dengan adanya pembiayaan mikro tersebut dapat menambah modal dengan membelanjakan barang dagangan lebih banyak dan penghasilannya juga dapat meningkat. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian modal dapat memberikan dampak positif bagi mereka, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya. Dengan demikian, kriteria kecukupan dalam program pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM telah tercapai dengan baik.

Perataan

Perataan menurut William N. Dunn (2003) adalah kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang - kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Dalam hal ini menanyakan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata.

Pada penelitian ini perataan berkenaan dengan bagaimana dana dari Koperasi Wanita Desa Minggirsari didistribusikan. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari yang menyampaikan bahwa pemberian dana tergantung pada anggota tersebut, yakni mempertimbangkan ekonomi dan kemampuan masing-masing anggota. Hal ini juga disampaikan oleh Bendahara Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari, yakni pembiayaan dilakukan dengan adil dan terdapat pembagian SHU yang dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan pemberian 40%. Pemberian tersebut dihitung seberapa besar jumlah nasabah atau penerima pembiayaan tersebut memberikan simpan wajib dan jasa kepada Koperasi Wanita Desa Minggirsari. Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku usaha penerima pembiayaan menyampaikan bahwa pinjaman yang diberikan dapat meringankan mereka selaku pelaku usaha, karena bunga yang diberikan hanya sedikit dan tanpa jaminan.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria perataan dana ini telah didistribusikan dengan adil, walaupun jumlah yang diberikan tidak sama, karena tergantung dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing anggota. Dengan mendapatkan SHU tersebut, penerima pembiayaan juga dapat penghasilan dari sisa tersebut, sehingga dapat digunakan untuk keperluan sehari-harinya.

Responsifitas

Responsifitas menurut William N. Dunn (2003) adalah berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini menanyakan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok - kelompok tertentu. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan pelaku usaha penerima pembiayaan mikro pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat, terutama dari penerima pembiayaan di Koperasi Wanita Desa Minggirsari telah menunjukkan respon yang puas. Dimana dengan adanya pembiayaan di koperasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan juga mereka mendapatkan SHU yang berguna untuk menambah penghasilan. Dengan demikian, kriteria responsifitas dalam William N. Dunn (2003) telah tercapai dengan baik.

Ketepatan

Ketepatan menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar - benar berguna atau bernilai. Ketepatan program pembiayaan mikro oleh Koperasi Wanita Desa Minggirsari mengacu pada apakah sasarannya sudah tercapai dan tujuan pembiayaan dapat disesuaikan dengan situasi yang terjadi di dunia nyata. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menyampaikan bahwa sasaran utamanya adalah kaum perempuan yang modalnya digunakan untuk menjalankan usaha dan hasil observasi kepada penerima pembiayaan di Koperasi tersebut menunjukkan bahwa modal yang diterima benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha, serta berguna dan bernilai, yakni dapat untuk menambah produk usaha dan hasil penjualannya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria ketepatan oleh William N. Dunn (2003) telah tercapai dengan baik, karena sasaran dan tujuannya telah tercapai serta berguna bagi penerima pembiayaan pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

Berdasarkan keenam indikator di atas, menunjukkan bahwa terdapat dampak yang sesuai dengan teori Cohen dalam (Dwi 2015:21), yaitu sebagai berikut.

a) Dampak terhadap Pendapatan

Menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menerima pembiayaan dari Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari telah mengalami peningkatan setelah mendapatkan modal dari koperasi tersebut.

b) Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi

Menunjukkan bahwa telah memberikan pengaruh positif pada kelancaran usaha para pelaku UMKM. Adanya program pembiayaan mikro dari Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari membuat pelaku UMKM bisa menambah stok barang, memperluas usaha, dan akhirnya aktivitas jual beli mereka semakin lancar.

c) Dampak terhadap Pengeluaran

Menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha masih mengalami pengeluaran yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu contohnya adalah kebutuhan yang tidak terduga. Pengeluaran yang tidak stabil tersebut pada akhirnya menyulitkan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan yang maksimal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha menjadi terpakai untuk kebutuhan lain yang bersifat konsumtif atau darurat.

Untuk mensejahterakan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, dapat dilihat dari keberhasilan usahanya, yakni peningkatan modal, pelanggan, jumlah produksi, perbaikan sarana fisik yang dijalankan dan perluasan usaha. Menurut Kotler & Keller (2021). indikator keberhasilan usaha yakni sebagai berikut.

a) Pendapatan Meningkat

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha penerima pembiayaan di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari, yaitu sebagai berikut.

1. Ibu S : Rp 3.000.000
2. Ibu Y : Rp 2.500.000
3. Ibu M : Rp 3.500.000
4. Ibu U : Rp 1.500.000

Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa Ibu M, ibu S, dan Ibu Y dapat dikatakan telah mencapai pendapatan di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah daerah, yakni UMR pada Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar Rp 2.413.974. Hal ini menunjukkan bahwa program pembiayaan mikro pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Namun demikian, Ibu U yang hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp1.500.000 per bulan, yang masih berada di bawah UMR Kabupaten Blitar. Artinya, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan kondisi awal, namun belum

semua pelaku usaha mampu mencapai taraf pendapatan yang sejahtera secara finansial berdasarkan UMR setempat, yakni di Kabupaten Blitar.

b) Pelanggan Meningkat

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa setelah pelaku usaha tersebut memperoleh pembiayaan, mereka dapat menyediakan atau menambah barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga pelanggan akan tetap berdatangan di toko atau di usaha tersebut.

c) Karyawan bertambah

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tidak adanya penambahan karyawan, karena usaha yang mereka kerjakan adalah usaha kecil, bukan usaha besar dan dijalankan oleh perseorangan.

d) Aset bertambah

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku usaha penerima pembiayaan di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dapat bertambah, seperti bertambahnya rak, etalase, dan sebagainya, sehingga dapat menjamin berlangsungnya kegiatan usaha tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM

Faktor Pendukung

a. Adanya Dukungan Dana dari Pemerintah

Dukungan dana dari pemerintah tentunya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan setiap program. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan dana yang nantinya akan menopang kegiatan yang sedang berjalan. Dari hasil wawancara dengan Bendahara Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dan kepala bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa Koperasi Wanita telah mendapatkan dana hibah dari pemerintah provinsi Jawa Timur sebesar 50 juta dan simpanan pokok dari anggota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dana tersebut menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan program pembiayaan di Koperasi Wanita Desa Minggirsari.

b. Adanya Dukungan Manajemen Umum

Dalam proses manajemen, terdapat proses pencatatan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, karena dengan berbagai proses tersebut pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari dapat berjalan dengan mudah. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menyampaikan bahwa proses pencatatan pada koperasi tersebut telah berjalan dengan baik, seperti administrasi yang selalu ada dan lengkap. Kemudian proses pengorganisasian pada koperasi tersebut dilakukan secara struktural, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga kelompok kerja. Untuk proses pengarahan dilakukan ketika ada anggota baru diberikan penjelasan terkait jumlah pinjaman, angsurannya, dan tujuan pembiayaan tersebut digunakan untuk apa. Kemudian untuk pengawas berjumlah 1 orang. Dengan demikian, adanya dukungan manajemen umum ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari.

c. Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Setiap program yang sedang berjalan harusnya mempunyai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan programnya. Apabila tidak ada hal tersebut, maka program yang sedang berjalan bisa menjadi tidak terarah dan tujuannya tidak bisa tercapai. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menyampaikan bahwa pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari telah didukung dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperoleh melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali, seperti tentang akuntansi, manajemen pengelolaan koperasi, dan sebagainya dengan tujuan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

d. Adanya dukungan dari masyarakat

Sebuah program tidak dapat berjalan baik tanpa dukungan masyarakat. Demikian pula, program pembiayaan mikro oleh Koperasi Wanita Desa Minggirsari tidak akan dapat berjalan secara baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dapat disimpulkan bahwa bentuk dukungan

masyarakat ialah berupa meminjam modal ke koperasi tersebut. Artinya mereka aktif memanfaatkan layanan koperasi sebagai solusi keuangan saat menghadapi kebutuhan mendesak, seperti saat ada acara keluarga (hajat). Dengan demikian, adanya dukungan dari masyarakat adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

e. Kredit tanpa jaminan

Faktor pendukung lainnya dalam dampak program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari adalah meminjam tanpa jaminan. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Wanita ini dengan pinjaman tanpa jaminan dapat memudahkan anggota untuk mendapatkan pinjaman di koperasi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Faktor Penghambat

a. Pemahaman Program Masih Kurang

Pemahaman program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menjadi suatu hal yang penting, karena kurangnya pemahaman tentang program yang dilaksanakan dapat menjadi penghambat. Salah satu kegiatan supaya masyarakat, terutama pelaku usaha paham terkait pembiayaan ini adalah dengan mengadakan sosialisasi. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dan pelaku usaha penerima pembiayaan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait pemahaman program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari hanya melalui lewat mulut ke mulut saja, seperti dari pengurus koperasi atau dari bu Wo. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan koperasi, karena masih dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, pemahaman program masih kurang ini menjadi faktor penghambat, karena masih terbatasnya sosialisasi yang diberikan, sehingga pemahaman yang diberikan menjadi kurang mendetail.

b. Kurangnya SDM yang betul - betul mengetahui Program

Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dan pelaku usaha penerima pembiayaan dapat disimpulkan bahwa SDM

yang ada di dalam koperasi telah terampil dalam ahlinya dan sudah berpengalaman. Hal ini ditunjukkan bahwa setiap tahun terdapat BIMTEK dari tingkat 2, seperti dari Dinas Koperasi, sehingga SDM yang ada di dalam koperasi tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dan pelaksanaan program pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang betul - betul mengetahui tentang program bukanlah penghambat dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari.

c. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana Kurang Sesuai dengan Kondisi Realistik

Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dapat menjadi faktor penghambat, karena terkadang dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana tidak sesuai dengan kondisi di lapang. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari menyampaikan bahwa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar telah diterapkan oleh Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dalam menjalankan program pembiayaan mikro. Salah satu contohnya adalah dalam penentuan jasa pinjaman sebesar 1,5%, yang disesuaikan dengan anjuran atau aturan dari dinas dan disepakati oleh anggota koperasi tanpa keberatan. Dengan demikian, adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan realita adalah bukan faktor penghambat dari pelaksanaan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari, karena dalam penyelenggaraan program pembiayaan mikro di Koperasi Wanita Desa Minggirsari telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar.

d. Persaingan sektor pembiayaan mikro

Faktor penghambat lainnya adalah terdapat jenis lembaga keuangan lain yang ada di dalam Desa Minggirsari. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Ketua Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari adalah terdapat persaingan yang cukup ketat di sektor pembiayaan mikro pada desa, di mana Kopwan harus bersaing dalam mempertahankan loyalitas anggotanya. Ketika anggota koperasi memiliki banyak pilihan sumber pembiayaan, potensi dana simpanan di koperasi dapat berkurang, dan risiko keterlambatan atau ketidaktertiban dalam pengembalian pinjaman pun meningkat. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah kredit macet. Akan tetapi, faktor penghambat tersebut bisa

ditangani oleh pengurus Koperasi Wanita Desa Minggirsari, seperti penerima pembiayaan atau nasabah tersebut untuk bisa tetap terus membayar agar kewajiban angsuran tetap berjalan, meskipun tidak sesuai jumlah semestinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pembiayaan mikro pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari telah berdampak dan bermanfaat bagi penerima pembiayaan di koperasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dampaknya terhadap pendapatan, aktivitas ekonomi, dan pengeluarannya yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan pada pelaku usaha dan dapat untuk mengembangkan usahanya, serta memenuhi kebutuhan sehari - harinya. Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu adanya dukungan dana dari pemerintah, adanya dukungan manajemen umum, adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, adanya dukungan dari masyarakat, dan pinjaman modal tanpa jaminan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kredit macet, tidak ada kantor Koperasi Wanita di Desa tersebut, dan masih kurangnya sosialisasi terkait pemahaman program pembiayaan mikro pada Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari.

Saran yang dapat penulis berikan adalah pengurus Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dan pejabat terkait di Desa Minggirsari disarankan untuk melakukan sosialisasi secara aktif dan menyeluruh kepada masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang belum mengetahui keberadaan koperasi tersebut. Tujuannya supaya masyarakat benar - benar memahami bahwa koperasi dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan usaha yang mudah diakses tanpa jaminan. Sosialisasi ini penting, karena berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat anggota masyarakat yang baru mengetahui keberadaan koperasi dari Bu Wo saat kegiatan sosial, yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi selama ini masih bersifat informal dan terbatas dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu, pengurus dan penjabat terkait perlu melakukan sosialisasi melalui cara yang lebih terstruktur dan strategis, seperti menyelenggarakan pertemuan rutin di tingkat dusun atau RT, memanfaatkan media sosial, serta membuat leaflet atau brosur yang disebarluaskan secara luas. Selain itu, diharapkan untuk kedepannya anggota Koperasi Wanita "Maju Makmur" Desa Minggirsari dapat membuat perencanaan keuangan, baik itu pengeluaran dan penghasilan yang didapat agar bisa lebih bertanggung jawab dalam membayar pinjaman kepada koperasi tersebut dengan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

DAFTAR REFERENSI

- Aldilla, R. (2021). *Analisis peranan pembiayaan mikro BSI KC Ahmad Yani terhadap keberlangsungan UMKM di Lampung Timur* (Skripsi Sarjana, Institut Islam Negeri (IAIN) Metro). <https://share.google/KIwdS7gDMfQWGPfPQ>
- Butar, N. B. B. (2020). *Peranan Koperasi Unit Desa Trani Maju dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragayu Hulu* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/10495>
- Dunn, N., & William. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (terj. Samodra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, P., & Rahmat. (2015). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Palembang: Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Ismail, M., Santoso, D. B., & Satria, D. (2024). Microfinance and poverty in Indonesia: The macro impact of people's credit bank. *Journal of Business Economics and Management*, 25(4), 647–664. <https://doi.org/10.3846/jbem.2024.22001>
- J. Moleong, L. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamila, R. H., Hardi, W., & Slamet, R. (2023). Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana darurat melalui program Call Center U-Garuda 112 di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 503–528.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). *Manajemen pemasaran* (Edisi ke-13, Jilid 2). Erlangga.
- Menghayati, O. S., & Iqbal, M. (2022). Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Desa Sapa, Kabupaten Empat Lawang. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 92–101. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.122>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-3). USA: Sage Publications.
- Putri, C. N. O. (2021). Evaluasi pengendalian internal dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah IB Muamalat modal kerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1129>
- Rofiq, A. (2024, 3 Mei). Dinkop-UKM Kabupaten Blitar anggarkan Rp 1,2 miliar, 170 UMKM ditargetkan naik kelas. *Jatim Times*. Diakses 6 Maret 2025, dari <https://jatimtimes.com/baca/311288/20240503/092800/dinkop-ukm-kabupaten-blitar-anggarkan-rp-1-2-miliar-170-umkm-ditargetkan-naik-kelas>

Santoso, D. B., Gan, C., Revindo, M. D., & Massie, N. W. G. (2020). The impact of microfinance on Indonesian rural households' welfare. *Agricultural Finance Review*, 80(4), 491–506.

Yanuar, A. R., Pramono, S., & Solichah, N. (2023). Evaluasi kebijakan pemberian insentif bagi pemilik bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 477–488.